



Media Berperan Penting dalam Membangun Ketahanan Nasional  
**hal 4**



MEA: Forum Kerjasama Bukan Forum Bersaing  
**hal. 5**



NMC Pakistan Diskusi Mengenai Pendidikan di Lemhannas RI  
**hal. 7**



Proyeksi Indonesia 2045  
**hal. 9**



## Lemhannas RI dan IHEDN Perkuat Hubungan Kerja Sama

**D**elegasi Lemhannas RI dipimpin oleh Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A. menghadiri Seminar Bilateral ke-3 Lemhannas RI – L'Institut des Hautes Études de Défense Nationale (IHEDN) di kantor IHEDN, Paris, Perancis, dari tanggal 15-16 Desember 2015.....(selengkapnya hal. 12)

## Daftar Isi:

Gubernur Lemhannas RI Apresiasi Penyelenggaraan Lemhannas Fellowship Program Angkatan I ...hal 2

Revisi Kurikulum PPRA 2016...hal 3

Media Berperan Penting dalam Membangun Ketahanan Nasional ...hal 4

MEA: Forum Kerjasama Bukan Forum Bersaing...hal 5

Nilai Kebangsaan Sangat Penting Dalam Pelayanan Kesehatan...hal 6

NMC Pakistan Diskusi Mengenai Pendidikan di Lemhannas RI...hal 7

Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara Kuliah Wawasan Kebangsaan...hal 8

Proyeksi Indonesia 2045...hal 9

Penyamaan Persepsi dalam Pendidikan Lemhannas RI...hal 10

NSC Australia Tawarkan Kerjasama Program Pendidikan...hal 10

Upaya Sinergi Lemhannas RI dan BNN Memerangi Narkoba...hal 11

Lemhannas RI dan IHEDN Perkuat Hubungan Kerja Sama...hal 12

## Tim Redaksi:

### Pengarah :

Suhardi Alius

### Penanggung Jawab :

E. Estu Prabowo

### Redaktur Pelaksana :

Wahyu Widji Pamungkas

### Penyunting/Editor :

Bambang Iman Aryanto

### Staf Redaksi :

Trias Noverdi, Aditya Solehah, Ni Made Vira Saraswati, C. Hildamona Permatasari, Magista Dian Fitrilia, Nia Yola

### Desain

Bambang Iman Aryanto

### Fotografer :

Suryadi, Suyono, Dwi Jayanto

### Sekretariat :

Linda Purnamasari, Gatot, Indah Winarni

### Distribusi :

Sumurung, Supriyono

### Alamat Redaksi :

Biro Humas Settama Lemhannas RI, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10, Jakarta Pusat, 10110,

Telp. (021) 3832108, 3832109, Fax. (021) 3451926,

Website <http://www.lemhannas.go.id>

## Gubernur Lemhannas RI Apresiasi Penyelenggaraan Lemhannas Fellowship Program Angkatan I



Foto : Humas Lemhannas RI

Senin (23/11), Proses penyeleksian kegiatan *Lemhannas Fellowship Program* 2015 Angkatan I (LFP Angkatan I) telah usai dan menghasilkan 10 peserta dari 325 pendaftar yang mengikuti seleksi. LFP merupakan program untuk mensosialisasikan nilai-nilai kebangsaan bagi seluruh kalangan, seperti akademisi, peneliti, TNI/ Polri, PNS, dan lain sebagainya sesuai dengan kualifikasi yang telah ditentukan yaitu secara kompetensi, asas distribusi provinsi, dan asas keahlian/ bidang studi.

Para peserta akan menempuh kegiatan kelas selama 2 minggu di Lemhannas RI, kemudian melakukan pendalaman materi di The Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS) Singapura, dan kembali lagi di Lemhannas untuk membuat naskah kajian untuk dipaparkan dihadapan jajaran pejabat struktural Lemhannas.

Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A. mengharapkan angkatan I ini menjadi contoh bagi angkatan selanjutnya. "Sebagai generasi muda potensial yang terpilih dari berbagai macam disiplin ilmu serta berasal provinsi, Saudara diharapkan dapat menjadi pemikir-pemikir yang dapat membangun opini publik untuk mempertahankan NKRI," ujar Budi Susilo.

Deputi Pengkajian Strategis Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Djagal Wiseso Marseno, M.Agr. selaku ketua penyelenggara menyatakan peserta LFP akan mengikuti kegiatan selama 1 bulan dan harus menghasilkan karya setelahnya. "Hasil kajiannya harus dipublikasikan pada media cetak maupun elektronik," ungkap Djagal.

Nantinya, peserta LFP Angkatan I diharapkan mampu melakukan kajian-kajian yang bertemakan ketahanan nasional. Setelah mengikuti LFP, para peserta akan mendapat wawasan sekaligus ide, pemikiran, dan konsepsi terkait ketahanan nasional. Menurut Djagal, para alumnyanya diharapkan dapat menjadi *critical mass* sebagai perpanjangan tangan Lemhannas untuk sosialisasi kebangsaan ke masyarakat luas.

Dalam pembukaan acara ini, turut hadir Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsekal Marsdy TNI Bagus Puruhito, S.E., M.M., Sekretaris Dewan Pengarah Lemhannas RI Dr. Ardi Partadinata, M.H., M.Si., para Deputi, para Kepala Biro, dan pejabat struktural Lemhannas RI lainnya.





# Revisi Kurikulum PPRA 2016

**L**emhannas RI menyelenggarakan Rapat Penataan Kurikulum PPRA (Program Pendidikan Reguler Angkatan) 2015 pada Selasa (24/11) yang menyepakati bahwa terdapat perubahan dalam penataan kurikulum tersebut yaitu mengenai masa pendidikan PPRA yang sebelumnya berlangsung selama 7,5 bulan diubah menjadi 7 bulan dalam rangka mengefektifkan proses pendidikan yang relevan dengan tujuan pendidikan Lemhannas RI.

“Perlu penataan kurikulum tahun 2016 dan materi disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Diharapkan peserta nantinya dapat berpikir secara holistik dan mengetahui arah permasalahan sehingga para peserta dapat mengimplementasikan berdasarkan materi yang telah diberikan sehingga PPRA akan lebih baik dan efektif dari PPRA sebelumnya”, ujar Deputy Pendidikan Tingkat Nasional Mayjen TNI M. Nasir Majid pada Rapat Penataan Kurikulum PPRA 2016.

Selama masa pendidikan, nantinya untuk penceramah, tutor, narasumber, dan materi dalam pendidikan, baik dari dalam dan luar Lemhannas RI, perlu dioptimalkan sesuai standar kompetensi atau Kurikulum berbasis Kompetensi. Kompetensi yang dituntut adalah *Knowledge, skill, dan attitude* sebagai unsur dasar dari kompetensi.

Lebih lanjut Nasir Majid menambahkan, peningkatan pembobotan penilaian dalam kepribadian sangat diperlukan sebagai salah satu tolak ukur dalam pendidikan. “Secerdas apapun seseorang kalau kepribadiannya tidak sesuai maka hasilnya menjadi tidak bagus” pungkas Nasir Majid.

Rapat yang dilaksanakan di Ruang Kresna Lt IV Astagatra membahas kurikulum PPRA TA 2016 dihadiri oleh Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI Bagus Puruhito, S.E., M.M., para Deputy, para Tenaga Ahli Pengajar, Tenaga Ahli Pengkaji, Tenaga Ahli Profesional, serta para Pejabat Struktural Lemhannas.

# Media Berperan Penting dalam Membangun Ketahanan Nasional

**D**alam rangka kegiatan forum komunikasi rutin Lemhannas RI dengan rekan-rekan Media, Biro Humas Lemhannas RI kembali menggelar *Coffee Morning* dengan para pemimpin redaksi media massa di Anjungan Lt. III Gedung Tri Gatra, Senin (30/11).

Ketua Dewan Pers Bagir Manan yang menjadi salah satu narasumber mengungkapkan bahwa pers tidak dapat lepas dari ketahanan nasional, "Penting untuk meletakkan secara pasti tatanan nasional sehingga pers dapat menempatkan diri, karena pers bukanlah institusi mandiri. Pers dapat mengambil respon di masyarakat, dan kemudian berinisiatif untuk mengarahkan opini publik", ujar lulusan program Doktor Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran tersebut.

Dalam kesempatan tersebut turut aktif dalam diskusi yaitu Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA yang menyadari peran penting media dalam ketahanan nasional, "Tidak satupun dinamika kehidupan nasional di berbagai daerah yang luput dari pemberitaan dan diketahui masyarakat luas sehingga peran media dibutuhkan untuk membentengi masyarakat dari berbagai informasi yang berpotensi menyesatkan dan memecah belah persatuan bangsa."

Oleh karenanya, Lemhannas RI menyelenggarakan *Coffee Morning* sebagai ajang bagi Pimpinan Lemhannas RI untuk berdiskusi santai dengan para pemimpin redaksi media massa untuk mendapatkan pandangan yang konvergen tentang peran media dalam membangun ketahanan nasional.

Selain Bagir Manan, acara ini dihadiri pula oleh sejumlah pemimpin redaksi media antara lain Pemimpin Redaksi Kompas Budiman Tanuredjo, Pemimpin Redaksi Okezone.com Syukri Rahmatullah, Kepala Pusat Pemberitaan RRI Agung Susatyo, Manajer Stasiun Radio Sonora Benedictus Herminanto, Deputi Direktur Pemberitaan Media Indonesia Gaudensius Suhardi, Pemimpin Redaksi Detik.com Arifin Asyhad, Pemimpin

Redaksi Majalah Tempo Arif Zulkifli, dan Wakil Pemimpin Redaksi Kompas TV Yogi A. Nugraha.

Pernyataan menarik dilontarkan Budiman Tanuredjo terkait fungsi media dalam ketahanan nasional. Budiman menyatakan, "Fungsi media dalam ketahanan nasional sebagai *warning system* atau peringatan dini terhadap peristiwa yang terjadi. Media juga berperan bagaimana menjadi bagian dari demokrasi dengan mengubah noise (kegaduhan di masyarakat, red) menjadi *voice* (pernyataan yang bermakna, red)".

Sementara itu, Syukri Rahmatullah menyatakan adanya tantangan baru dalam ketahanan nasional yang selama ini belum disadari masyarakat. "Sebanyak 7,71 juta penduduk di Indonesia menggunakan internet, namun media *digital* saat ini kurang terhadap penyaringan. Maka dari itu perlu pertahanan dari penyebaran paham radikal dan *hacker* (peretasan, red)" ujar Syukri.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dampak yang tidak baik yaitu menggunakan sistem dan peralatan yang menjamin keamanan komunikasi dan informasi, menggunakan produk bangsa Indonesia, dan sistem yang menggunakan enkripsi yang mencegah pencurian informasi.





Foto : Humas Lemhannas RI

## MEA: Forum Kerjasama Bukan Forum Bersaing

Pada prinsipnya kerjasama tidak boleh ada yang dirugikan dan saling mengamankan konstitusi, kedaulatan, dan kepentingan nasional masing-masing negara karena makna kerjasama bukanlah ajang jual-beli kedaulatan. Maka dari itu insting mengenai persaingan perlu disingkirkan” ujar Guru Besar Ilmu Ekonomi FEUI Prof. Dr. Ir. Sri Eddy Swasono selaku pembicara dalam Acara *Round Table Discussion* (RTD) kajian berlanjut I mengenai Strategi Indonesia sebagai *Driving Force* Guna Pengimplementasian Asean Economic Community dalam Rangka Ketahanan Nasional di Ruang Kresna Lt IV Gd Astagatra Lemhannas RI, Selasa (01/12).

Pada diskusi ini, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Prof. Dr. Sri Adiningsih mengatakan “*We have serious problem, what would happen if we not changed*, apakah Indonesia siap menghadapi MEA?”. Sementara, perkembangan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini tidak begitu menggembirakan dan berpotensi membahayakan ketahanan nasional. Maka dari itu, pemerintah dituntut segera mempersiapkan langkah yang strategis menghadapi MEA dengan menyusun dan menata kembali kebijakan-kebijakan nasional yang sinergis agar dapat lebih mendorong dan

meningkatkan daya saing (*competitiveness*) sumber daya manusia dan industri di Indonesia sehingga tercipta pembangunan ekonomi yang berkualitas.

Lebih lanjut, Agar MEA tidak mengarah ke persaingan melainkan mengarah ke pertumbuhan bersama, maka prinsip kerjasama secara bilateral maupun multilateral dapat dilakukan dengan meningkatkan hubungan kerjasama di dalam negeri, menciptakan keunggulan komparatif baru untuk meningkatkan efisiensi lokal dan produktifitas nasional, mutualisme, sinergisme memajukan *socio-economic complementarities*, saling menghormati tradisi, budaya, kedaulatan masing-masing negara, dan tidak meninggalkan *culture piece*.

Selain masalah ekonomi, yang perlu diperhatikan dalam menghadapi MEA adalah peran media massa dalam mengedukasi masyarakat. “Peran media massa perlu ikut serta dalam mengedukasi masyarakat Indonesia tentang adanya MEA dan mengkampanyekan secara intensif untuk membekali masyarakat mengenai isu-isu strategis khususnya MEA”, pungkas Asisten Presiden Direktur Metro TV Shanti Retno Ruwyastuti.

# Nilai Kebangsaan Sangat Penting Dalam Pelayanan Kesehatan

**R**abu (02/12), Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A dalam sambutan pembukaan Pemantapan Nilai Kebangsaan bagi kalangan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) di Ruang Dwiwarna Gd. Pancagatra Lemhannas RI menyatakan bahwa pemantapan nilai kebangsaan memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong dan memotivasi tumbuhnya kesadaran kebangsaan. Hal tersebut dikarenakan pelayanan kesehatan yang bermutu hanya mampu diberikan oleh dokter dengan *knowledge* dan *experience* yang mumpuni serta *attitude* sesuai dengan bidangnya dengan tidak meninggalkan nilai-nilai kebangsaan.

“Wajib sebagai seorang dokter yang bergerak dalam bidang kesehatan untuk melaksanakan pemantapan mengenai nilai-nilai kebangsaan berdasarkan empat konsensus. Bekal yang diberikan nantinya berguna untuk bangsa dan negara”, ujar Ketua KKI Prof. Dr. Dr. Bambang Supriyanto, Sp.A (K).

Sementara, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan bahwa peningkatan kompetensi dan kapabilitas sangat penting untuk menghasilkan pemimpin yang kuat, visioner, berkarakter, memiliki wawasan luas, dan *excellent* agar mampu mengemban amanah mulia dalam mengelola program kesehatan nasional demi kesejahteraan rakyat Indonesia.

Dengan pelatihan ini diharapkan, Para dokter dan pelayan kesehatan dapat menjadi pemimpin dalam hal melayani masyarakat dalam bidang kesehatan yang berwawasan kebangsaan, memiliki jiwa bersih, dan jiwa nasionalisme yang kuat serta mengutamakan kepentingan negara dan bangsa diatas kepentingan pribadi dan golongan.

Pemantapan nilai kebangsaan bagi KKI dan BPJS Kesehatan ini dilaksanakan selama satu minggu dari tanggal 2 s.d 8 Desember 2015 dengan peserta sebanyak 100 orang yang terdiri dari 85 orang dari KKI dan 15 orang dari BPJS Kesehatan.



Foto : Humas Lemhannas RI





Foto : Humas Lemhannas RI

## NMC Pakistan Diskusi Mengenai Pendidikan di Lemhannas RI

**R**abu (02/12), Delegasi NMC (National Management Course) Pakistan yang dipimpin oleh Naeem Aslam, disambut oleh Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdyia TNI Bagus Puruhito, S.E., M.M. di Ruang Nusantara II Lt.I Gd trigatra untuk melakukan diskusi mengenai pendidikan di Lemhannas.

Dalam paparan yang disampaikan pada diskusi tersebut, disampaikan bahwa salah satu tugas Lemhannas RI yaitu melaksanakan pendidikan yang mengikutsertakan kalangan sipil, militer, dan polisi untuk menjadi calon pemimpin nasional di masa depan. Program pendidikan terbagi dua yaitu Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) selama 7,5 bulan dan Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) selam 5,5 bulan.

Dalam program pendidikan PPRA dan PPSA di Lemhannas RI, Kegiatan utama yang dilakukan meliputi Pengenalan Objek Strategi, Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN), Studi Strategis Luar Negeri (SSLN), Program Pilihan, Olahsismenas, dan Penulisan Kertas

Karya Perorangan (Taskap). Salah satu dari kegiatan utama dalam program pendidikan di Lemhannas RI yaitu SSLN, merupakan kegiatan pendidikan untuk mengetahui kondisi objektif negara tujuan pada aspek-aspek tertentu yang memiliki nilai-nilai strategis sebagai bahan kajian.

Lebih lanjut, Kurikulum pendidikan di Lemhannas RI sendiri didapatkan dari pelaksanaan seminar atau sarasehan mengenai isu-isu strategis sebagai bahan input pendidikan sehingga pendidikan menjadi lebih baik.

Tenaga Profesional Bidang ekonomi Lemhannas RI Dr. Rosita S. Noor, M.A, menyampaikan bahwa selain pendidikan, Lemhannas RI juga memberikan pelatihan wawasan kebangsaan kepada para pejabat/pimpinan di daerah mulai dari Gubernur, Walikota, serta Bupati dengan tujuan pelatihan agar memiliki "Sense of being Indonesian" yang baik.

# Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara

## Kuliah Wawasan Kebangsaan



**K**amis (3/11), “Diharapkan para mahasiswa dengan kuliah wawasan kebangsaan dapat memahami wawasan mengenai nusantara”, ujar Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara (FE Untar) Ronnie Resdianto Masman, S.E., M.A., M.M. di Gd. Trigatra Lt.III Timur Ruang Konstitusi. Kunjungan mahasiswa FE Untar dalam rangka kuliah singkat mengenai wawasan kebangsaan ini disambut oleh Kepala Biro Humas Lemhannas RI Laksma TNI E. Estu Prabowo, M.Sc.

Dalam kuliah tersebut, Tenaga Profesional Lemhannas RI Dr. Kausar A. S., M. Si selaku pemateri, menyampaikan bahwa ancaman bagi bangsa Indonesia saat ini tidak hanya berorientasi kepada perspektif militer, namun ancaman tersebut sudah melebar ke berbagai gatra (Ideologi, ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi informasi, dan sebagainya).

Pelebaran ancaman tersebut kini mengancam keutuhan bangsa dan negara, maka perlu dibangun kewaspadaan nasional sebagai suatu sikap dalam hubungan dengan nasionalisme yang berawal dari rasa peduli dan rasa tanggungjawab seorang warga negara terhadap kelangsungan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

Euforia kebebasan masih mewarnai berbagai sikap yang membuat pola kebijakan cenderung tidak konsisten dalam menentukan sikap dalam jangka pendek dan melupakan kewajiban atau tanggung jawab asasi. Rasa kebersamaan yang dilandasi semangat kebangsaan sangat diperlukan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam menjaga keutuhan negara.

“We have only one management. Maksudnya manajemen pemerintahan pusat dan daerah dalam satu pemerintahan”, ujar Tenaga Profesional Lemhannas RI Dr. Kausar A. S., M. Si.

Lebih lanjut Kausar menambahkan dalam penyampaian materi kepada mahasiswa FE Untar, revolusi mental merupakan reformasi kebijakan pemerintah sebagai upaya membentuk manusia sehingga memiliki karakter yang kuat, berpikiran maju dan berpandangan modern dalam mewujudkan negara yang baik dengan integritas, memiliki etos kerja, dan gotong royong. Kemudian, kuliah tersebut diakhiri dengan tanya-jawab dan foto bersama.







# Proyeksi Indonesia 2045

**S**elasa (8/12), “*Imbalance* dalam kebijakan pemerintah akan selalu terjadi”, ujar Drs. Makmur Keliat, Ph.D, Dosen Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Indonesia saat membahas proyeksi Indonesia kedepan untuk membentuk konstruksi gagasan 2045 pada acara Seminar Ketahanan Nasional 2045 di Ruang NKRI Gd. Pancagatra Lt.III, Jakarta.

Sebelumnya, acara Seminar “Ketahanan Nasional Indonesia 2045” dibuka oleh Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA dilaksanakan di Ruang Auditorium Gadjahmada dan dihadiri oleh Sekretaris Utama Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, M.H., para deputy, Tenaga Pengajar, Pengkaji, profesional, para Pejabat Struktural Lemhannas serta para undangan seminar.

Seminar tersebut dibagi menjadi dua kelas (A dan B). Untuk kelas A membahas gatra geografi, demografi, Sumber Kekayaan Alam, dan ekonomi berlokasi di Ruang Bhinneka Tunggal Ika. Sedangkan Kelas B membahas tentang gatra ideologi, politik, sosial-budaya, dan pertahanan dan keamanan berlokasi di Ruang NKRI.

Anggota DPR RI Komisi VII Dr. H. Kurtubi, S.E., M.Sc menyampaikan kunci utama dalam pembangunan yang muncul

berdasarkan kondisi yang dilihat saat ini adalah *human resource*, *productivity*, dan infrastruktur. Ketiga kunci tersebut merupakan solusi bagi pemerintah dalam penyelenggaraan negara. Lebih lanjut H. Kurtubi menjelaskan, sebenarnya pembangunan harus memperhatikan situasi penduduk dengan melihat peluang bonus demografi diantaranya peningkatan jumlah penawaran tenaga kerja, tabungan, dan *human capital*.

Menurut Guru Besar Fakultas Geografi Universitas Universitas Gadjah Mada Prof. Dr. Hartono, D.E.A., D.E.S.S, letak strategis NKRI sangat potensial namun karena pengelolaan wilayah yang masih rapuh maka diperlukan keterlibatan seluruh *stakeholder* untuk melakukan pengelolaan sumber daya terkait geografi.

Denni P. Purbasari, S.E., M. Sc., Ph. D Deputy III Kepala Staf Kepresidenan Bidang Pengkajian Isu-Isu Ekonomi Strategis menambahkan bahwa berdasarkan data tahun 2014 dan tahun sebelumnya, beberapa bidang antara lain bidang demografi, pendidikan, investasi, dan produktivitas optimis membaik hingga tahun 2045. Walaupun di sisi lain masih terlihat lemahnya teknokrasi ekonomi, ketidakpastian hukum, serta kebijakan yang kurang nampak.

# Penyamaan Persepsi dalam Pendidikan Lemhannas RI



Foto : Humas Lemhannas RI

Jumat (10/12), “Diharapkan Titik temu atas perbedaan pandangan yang berkembang, akan mampu mewujudkan sasaran pokok evaluasi pendidikan yaitu dengan meningkatkan kualitas pendidikan yang berbasis kepada kebutuhan peserta, dan peningkatan tenaga pengajar, tenaga pengkaji, profesional, serta tutor pendidik”, ujar Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A pada Acara Evaluasi Pendidikan TA 2015 yang berlangsung selama dua hari di Ruang NKRI Gd. Pancagatra Lt.III.

Pada prinsipnya, evaluasi pendidikan 2015 Lemhannas RI merupakan bentuk atensi dan keseriusan dalam memperbaiki proses pendidikan sehingga dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraannya. Sementara itu, Deputi Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Mayjen TNI M. Nasir Majid mengatakan dalam rangka

meminimalisasi dan menyelesaikan perbaikan penyelenggaraan pendidikan agar kedepan menjadi lebih baik, maka dilaksanakanlah kegiatan evaluasi pendidikan.

Lebih lanjut Nasir Majid menjelaskan, kegiatan evaluasi diselenggarakan untuk menemukan kesamaan persepsi para tenaga pendidik dalam melaksanakan diskusi, peningkatan operasional pendidikan yang menyangkut peserta, pemateri, tenaga pendidikan, *alin along ins* dan fasilitas dan metoda pendidikan, *update modul* dan bahan ajar sesuai dengan kondisi saat ini, serta kesamaan metode penulisan Taskap (Kertas Karya Perorangan).

Pelaksanaan evaluasi pendidikan TA 2015 dibagi kedalam dua sesi paparan evaluasi. Sesi pertama mengenai evaluasi pendidikan TA 2015 secara umum yang dipaparkan oleh Mayjen TNI M. Nasir Majid, dan dilanjutkan evaluasi tentang produk dan DD (Diskusi Pendalaman), DK (Diskusi Kelompok), DAK (Diskusi Antar Kelompok) yang dipaparkan oleh Mayjen TNI (Purn) Lumban Sianipar, S.I.P. Selanjutnya dalam sesi kedua, paparan evaluasi tentang Taskap dipaparkan oleh Mayjen TNI (Purn) Ir. Sary Sutaat dan evaluasi mengenai penilaian peserta dipaparkan oleh Prof. Dr. Ir. Dadan Umar Daihani, D.E.A.

Acara diskusi tersebut dihadiri oleh Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdy TNI Bagus Puruhito, S.E., M.M., Sekretaris Utama Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, M.H., Sekretaris Dewan Pengarah Dr. Ardi Partadinata, M.H., M.Si., serta Pejabat Struktural Lemhannas RI.

Selasa (15/11), Head of National Security College (NSC) Australia Prof. Rory Medcalf didampingi oleh Defense Attache Australia BG. John L. Gould, dan Captain Navy Robert William Plath kembali melakukan *Courtesy Call* (CC) mengenai program kerjasama antara NSC dengan Lemhannas di Ruang Tamu Gubernur Gd. Trigatra Lt. I.

“Lemhannas sebagai pendidik para calon kader pemimpin dapat bekerja sama dengan NSC Australia dalam mendidik para peserta yang berkualitas untuk melakukan pendidikan di Australia dengan fasilitas pendidikan yang lengkap”, ujar Rory Medcalf.

Rory Medcalf menjelaskan bahwa NSC menyelenggarakan studi pasca sarjana, program profesional dan program pendidikan eksekutif yang fokus pada pembuatan kebijakan keamanan yang bekerja sama dengan Australia National University (ANU). Program studi pascasarjana NSC terdiri dari academic program, Ph.D. Program, *training* dan *national security community*.

Pendidikan di NSC Australia, lanjut Rory Medcalf, memiliki berbagai keunggulan dalam bidang studi keamanan seperti *research national security, domestic security, cyber security*, dan lainnya untuk mendukung pendidikan.

## NSC Australia Tawarkan Kerjasama Program Pendidikan



Foto : Humas Lemhannas RI

Dalam CC tersebut turut hadir Sekretaris Utama Lemhannas RI Komjen Pol Drs. Suhardi Alius, M.H., Tenaga Pengkaji Bid. Strategik Mayjen TNI Sunindy, Tenaga Profesional Bid. Diplomasi dan Hubungan Internasional Marsda TNI (Purn) Surya Dharma, S.I.P, Direktur Pengkajian Politik Drs. Hanif Salim, M.A., Kepala Biro Kerja Sama Brigjen TNI Ivan R Pelealu, S.E., dan Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Wahyu Widji Pamungkas, S. Kom., M.M.



## Upaya Sinergi Lemhannas RI dan BNN Memerangi Narkoba

**S**enin (21/12), “Meluasnya peredaran narkoba di lingkungan masyarakat jenis sintetis alami maupun jenis baru perlu ditangani”, ujar Kepala BNN Komjen Pol. Drs. Budi Wiseso, S.H. pada Acara penandatanganan Nota Kesepahaman antara Lemhannas RI dengan BNN di Ruang Nusantara Gd. Trigatra Lemhannas RI.

Dari 348 narkoba jenis baru di dunia, di Indonesia sendiri terdapat 36 narkoba jenis baru yang dibuat secara profesional. Menurut hasil survei yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN). Sepanjang tahun 2014 terdapat 4 juta lebih anak negeri yang terlanjur mengkomsumsi narkoba. Hal tersebut membuktikan perlu perhatian yang serius dari seluruh pihak.

Acara penandatanganan Nota Kesepahaman antara Lemhannas RI dengan BNN diselenggarakan dalam rangka meningkatkan peran Lemhannas RI dalam Pencegahan, Pemberantasan, Penggunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) guna mewujudkan Indonesia bebas narkoba.

Gubernur Lemhannas RI menjelaskan bahwa nota kesepahaman ini merupakan upaya bersama Lemhannas RI dan BNN dalam mencapai sinergitas untuk memperluas sekaligus memperkuat

wawasan masyarakat dalam ketahanan nasional, dan upaya mewujudkan P4GN untuk meminimalisir atau meniadakan korban narkoba sehingga masyarakat tetap memiliki jiwa, mental, dan moral yang sehat.

Pada kesempatan ini, Kepala BNN Komjen Pol. Drs. Budi Wiseso, S.H. mengatakan bahwa BNN dengan Lemhannas dapat bersinergi dalam upaya mengkampanyekan serta mensosialisasikan bahaya, penyalahgunaan, dan peredaran narkoba. “Seoyogianya bahaya narkoba dapat dimasukkan ke dalam indikator pengkajian ketahanan nasional agar masyarakat sadar bahwa permasalahan narkoba sudah sangat mengawatirkan” ujar Budi Wiseso.

Kesepahaman dengan BNN meliputi, pertama, kesepahaman tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, pertukaran tenaga ahli dan penyelenggaraan pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Kedua, kesepahaman pertukaran informasi, pelaksanaan pengkajian sesuai dengan kesepakatan.

Penandatanganan Nota Kesepahaman ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI Bagus Puruhito, S.E., M.M., para Pejabat Struktural Lemhannas RI dan para Pejabat BNN.



Foto : Humas Lemhannas RI

## Lemhannas RI dan IHEDN Perkuat Hubungan Kerja Sama

Delegasi Lemhannas RI dipimpin oleh Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A. menghadiri Seminar Bilateral ke-3 Lemhannas RI – L'Institut des Hautes Études de Défense Nationale (IHEDN) di kantor IHEDN, Paris, Perancis, dari tanggal 15-16 Desember 2015.

Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Lemhannas RI didampingi oleh Taprof. Bid. Sumber Kekayaan Alam Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Dadan Umar Daihani, D.E.A., Taprof Bid. Kepemimpinan Lemhannas RI Mayjen TNI (Purn) Albert Inkiriwang, Taprof Bid. Sismennas Lemhannas RI Laksda TNI Purn. Soemindiharso, Taprof Bid. Sismennas Lemhannas RI Dr. Avanti Fontana, kepala Biro Humas Laksma TNI E. Estu Prabowo, M.Sc. dan Kepala Biro Kerja Sama Brigjen TNI Ivan R Pelealu, S.E.

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari tersebut merupakan kelanjutan dari seminar pertama yang diselenggarakan pada tanggal 26 November 2013 di Paris dan seminar kedua yang diselenggarakan di Lemhannas RI, Jakarta, pada tanggal 6 Mei 2014.

Dalam kegiatan seminar pada hari pertama, kedua institusi saling bertukar pandangan terkait perkembangan lingkungan strategis terkait stabilitas keamanan di masing-masing kawasan. Delegasi Lemhannas RI menyampaikan paparan dengan tema “Indonesia and its regional security environment”, sementara IHEDN mempresentasikan paparan yang bertemakan “france and its regional security environment”.

Dalam sambutannya, Gubernur mengemukakan bahwa dengan adanya diskusi yang mengangkat isu strategis yang berkembang di kedua kawasan, diharapkan akan diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika geopolitik yang akan bermanfaat untuk kepentingan kedua negara. Selain itu ia juga mengungkapkan makna penting dari pelaksanaan dialog bilateral yang akan diselenggarakan pada hari ke-2.

“Kegiatan dialog bilateral tersebut memiliki nilai strategis bagi terjalinnya hubungan kerja sama yang lebih erat antara kedua negara, utamanya antara Lemhannas RI dan IHEDN”, ujarnya.

Kegiatan dialog bilateral antara pemerintah Republik Perancis dan Republik Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2015 itu kemudian diakhiri dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) oleh kedua belah pihak dalam bidang pendidikan dan pengkajian strategis.

Penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut akan menjadi stimulan bagi terwujudnya hubungan kedua negara yang lebih erat melalui *government-to-government diplomacy*, yang nantinya diharapkan akan berkembang hingga tataran *people-to-people diplomacy*.

Dalam forum pertemuan tersebut disepakati oleh kedua belah pihak bahwa Seminar Bilateral ke-4 antara Lemhannas RI dan IHEDN akan diselenggarakan di Jakarta pada 2016. Selanjutnya, sebagai salah bentuk implementasi dari MoU yang sudah ditandatangani, akan dilakukan pertukaran tenaga pengajar dan peserta program pendidikan antara kedua instansi.